

**ANALISIS POLITIK IDENTITAS PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF 2024
DI DAERAH PEMILIHAN IV
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK**

Afifah Rusyanti

NPP. 32.0681

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Politik Indonesia Terapan

Email: afifahrusyanti123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M.

ABSTRACT

Problem Statement: There are still significant differences in the results of the 2024 legislative elections for Electoral District 4, Pontianak City, West Kalimantan Province, which are based on differences in the identities of the prospective legislative candidates. **Purpose:** his study aims to analyze identity politics in the 2024 legislative election in Electoral District IV, Pontianak Timur District, Pontianak City. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach, and refers to Pierre L. van den Berghe's theory of identity politics which includes the perspectives of primordialism, constructionism, and instrumentalism. The data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and documentation. **Result:** he results of the study show that identity politics is formed from the community itself who chooses candidates from their shared identity. Based on data on ethnic groups occupying West Kalimantan, voting behavior in Pontianak Timur District tends to choose representatives based on the same ethnicity as them. However, it does not cause competition or trigger conflict. This indicates that the existence of identity politics that occurs on a small scale does not interfere significantly. **Conclusion:** The impact of identity politics is dualistic; positively, it increases political participation and community involvement; but negatively, it has the potential to divide society and strengthen feelings of exclusivity based on group identity. This study suggests the need for increased political education so that people consider the capabilities and programs of candidates more than their identity background.

Keywords: Identity Politics; 2024 Legislative Election; Ethnicity; East Pontianak.

ABSTRAK

Permasalahan: Masih adanya perbedaan hasil yang jauh dalam pemilihan legislatif 2024 Daerah Pemilihan 4 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang didasari oleh perbedaan identitas bakal calon legislatif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik identitas pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Daerah Pemilihan IV Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta mengacu pada teori politik identitas Pierre L. van den Berghe yang mencakup perspektif primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme. Adapun data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas terbentuk dari masyarakat sendiri yang memilih calon berasal dari kesamaan identitas mereka. Berdasarkan data etnis yang menempati Kalimantan Barat, perilaku memilih dalam kecamatan Pontianak Timur cenderung memilih perwakilan berdasarkan etnis yang sama dengan mereka. Akan tetapi tidak menimbulkan persaingan atau memicu terjadinya konflik. Hal ini menandakan adanya politik identitas yang terjadi dalam skala kecil tidak mengganggu secara signifikan. **Kesimpulan:** Dampak politik identitas ini bersifat dualistik; secara positif, ia meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan komunitas; namun secara negatif, ia berpotensi memecah belah masyarakat serta memperkuat sentimen eksklusivitas berdasarkan identitas kelompok. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pendidikan politik agar masyarakat lebih mempertimbangkan kapabilitas dan program calon dibanding latar belakang identitas mereka

Kata kunci: Politik Identitas; Pemilu Legislatif 2024; Pontianak Timur.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pada pelaksanaannya, demokrasi ini dikaitkan dalam kegiatan politik yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk demokrasi Indonesia yaitu adanya pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum merupakan sebagai wadah dari pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum juga menjadi bentuk nyata dari demokrasi serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendukung sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. Rakyat pun berdaulat untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi sebagai perwakilan atau kepercayaan mereka di dunia pemerintahan.

Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" menjelaskan bahwa politik memiliki arti "bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu (Budiardjo, 2007). Politik secara umum, merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengapai kehidupan yang lebih baik. Situasi kondisi saat ini, memberikan asumsi yang keliru pada masyarakat awam, tentang politik, politik lebih diartikan pada perbuatan-perbuatan yang negatif, seperti terjadinya konflik, terjadinya demonstrasi yang arogan (Eviany, 2019). Pengertian politik sebagai kegiatan atau aktivitas publik mendapatkan pemahaman dan pandangan tersendiri dari para ahli. Ada yang memandang pengertian ini sebagai

sesuatu yang positif, sementara ada yang memandangnya dengan negative (Rusfiana, 2020). Indonesia, sebagai negara yang dianugerahi keberagaman budaya, agama, dan ras, seringkali diuji oleh isu-isu identitas yang menjadi pusat perdebatan dalam politiknya. Pasalnya, identitas bukanlah masalah yang harus dihindari, karena setiap warga negara Indonesia memiliki identitas yang tercantum dalam administrasi kependudukan mereka. Namun, isu-isu identitas seringkali dimanipulasi untuk kepentingan politik, dan inilah yang perlu diwaspadai (Labolo, 2023). Jeffrey Weeks mengatakan bahwa identitas menjadikan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan terkandung di dalamnya juga persamaan orang tersebut. Jeffrey juga mengungkapkan bahwa identitas bagi individu dan kelompok ataupun komunitas merupakan penekanan yang penting (Widiyanti, 2009). Dalam Kamus Merriam Webster, identitas diartikan sebagai *“the distinguishing character or personality of an individual or the relation established by psychological identification”* (Merriam, 2020). Menurut Richard Jenkins, identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Orang dapat membedakan identitas dengan mengkategorikan diri dengan orang lain. Identitas pada awalnya berkembang sebagai hasil dari proses kategorisasi (Perdana, 2023). Baik Agnes Heller maupun Donald L. Morowitz memiliki kesamaan bahwa politik identitas didefinisikan sebagai politik perbedaan (Haboddin, 2012). Manuel dalam bukunya menjelaskan bahwa sebuah identitas yang terbentuk dalam individu maupun kelompok merupakan hasil dari proses pembentukan identitas (Manuel, 2010).

Politik identitas merupakan salah satu topik yang paling banyak dibahas dan diteliti oleh para ahli di seluruh dunia. Politik identitas pertama kali mendapat perhatian yang signifikan dari berbagai kalangan di Amerika Serikat karena adanya diskriminasi yang sangat kental antara kulit putih dan kulit hitam (Syamsurrijal et al., 2022). Politik identitas menjadi akar politik mengenai kesatuan masyarakat yang kesamaannya perlu dibuktikan dalam masyarakat luas. Dimana masyarakat akan berusaha menguatkan dan menunjukkan bahwa identitas dalam lingkup kelompok yang ada semakin besar dengan pengakuan sosial. Menurut Lukmantoro dalam jurnal (Nasrudin & Nurdin, 2019) politik identitas yang berfokus terhadap kepentingan dari pelaku suatu kelompok disebabkan persepsi identitas atau kepribadian berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, maupun sifat gender dan agama yang seragam. Mircea Brie dalam jurnalnya mengatakan bahwa identitas, baik itu identitas individu, kelompok, atau komunitas, dapat menghasilkan konvergensi dan divergensi dalam hubungan dengan yang lain. Yang lain, dikotomi sejati, menjadi ekspresi dari yang melampaui - melampaui apa yang khusus bagi saya, bagi identitas saya. Dengan demikian, sebuah perbatasan, baik simbolis maupun ideologis, dapat diidentifikasi di sekitar konstruksi identitas tersebut (Brie & Solcan, 2025). Kleinfeld dalam jurnal (Henderson, 2025) mengatakan bahwa para pemilih menunjukkan kekakuan yang meningkat, atau pengapuran, dalam loyalitas politik mereka, sering kali mengaitkan afiliasi politik mereka dengan identitas ras, etnis, atau agama mereka. Kelompok etnis minoritas telah dikecualikan dan didiskriminasi berdasarkan perbedaan ras dan budaya karena jumlah mereka lebih sedikit dan dianggap asing dalam berbagai kelompok atau negara (Kim et al., 2025). Dijelaskan juga oleh Pierre L Van Den Berghe dalam bukunya mengatakan bahwa politik identitas dibentuk dalam konteks hubungan kekuasaan yang meluar dari masyarakat yang majemuk, etnis, agama, perbedaan kelas, gender dan kelompok sosial lainnya. Ia juga mengatakan ada 3 (tiga) perspektif ketika mengamati/mengkaji politik identitas, di antaranya primordialisme, konstruksionisme dan instrumentalisme (Berghe, 1987).

Contoh kasus terjadinya politik identitas di negeri ini ialah kasus pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017. Di masa itu terdapat 2 (dua) pasangan calon yaitu Basuki Tjahja Purnama dan Anies Baswedan. Saat mengadakan survei antara pasangan calon tersebut hasil menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata akan memilih Ahok sebagai pemenang dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun, fakta mengejutkan hasil akhir yang didapatkan Ahok kalah dalam putaran Pilkada 2017 kala itu. Ahok juga dianggap sebagai rasis karena tergolong kedalam ras putih serta faktor agama. Dalam jurnal (Fabiana Meijon Fadul, 2019) Ahok dinilai menjadi penjajah yang ingin menggusur pribumi

sehingga membuat identitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa ini berperilaku keras dan menjajah.

Politik identitas terutamanya mengenai etnis di Kalimantan Barat juga bukan hal baru dalam sejarah perebutan kekuasaan atau kursi di pemerintahan. Era reformasi juga memberikan perhatian terhadap keberadaan identitas “putra daerah” sebagai bahan kampanye agar menarik perhatian masyarakat. Bawaslu pada tahun 2023 merilis data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang juga menyatakan bahwa Kota Pontianak termasuk IKP dengan kategori sedang di dimensi kontestasi di mana dimensi ini mengenai latar belakang etnis, suku, dan agama, kampanye bermuatan SARA, dan adanya konflik antar pendukung peserta sehingga berpotensi kerawanan sosial di masyarakat. Kota Pontianak yang merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat juga didiami oleh beberapa etnis dan agama di dalamnya. Etnis yang mengisi daerah Pontianak ialah suku Melayu, Cina, Jawa, Madura, Bugis dan Dayak. Agama masyarakat yang mendiami Kota Pontianak juga beragam seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota DPRD Kab/Kota periode 2024-2029 yang terlaksana di Kecamatan Pontianak Timur, salah satunya Daerah Pemilihan 4 diikuti 18 partai dan salah satunya ialah Partai Solidaritas Indonesia. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan terdapat 2 (dua) calon yang maju di daerah pemilihan 4 Pontianak Timur dari Partai PSI.

Alasan penulis mengambil kedua calon yang berasal dari PSI dikarenakan partai ini baru bergabung resmi di pemilu pada tahun 2019. Dilansir dari berita Tempo.com, Grace Natalie selaku pendiri PSI mengatakan bahwa partainya ini menjadi partai yang mewarnai dunia politik yang baru karena menekankan pada anak muda dan perempuan. Ia juga menambahkan selama ini kedua item tersebut dianggap kurang terwakili kepentingannya di dunia politik. Penulis juga melihat dalam data yang bersumber KPU mengenai penetapan hasil rekap pemilihan legislatif daerah pemilihan 4 (empat) pada 2024, PSI hanya mengusungkan 2 (dua) calon yang terdiri dari pria dan wanita dengan perbedaan suara yang timpang, suara minoritasnya saja kurang dari 50% suara mayoritas, hal ini mencolok perhatian penulis. Setelah penulis mencari data lebih lanjut ditemukan juga 2 (dua) calon itu mempunyai perbedaan latar belakang berupa gender, etnis dan agama. Dimana nomor urut 1 (satu) merupakan pria yang berasal dari etnis Jawa beragamaan Islam sedangkan saingannya wanita yang berasal dari etnis Dayak selaku etnis yang mendominasi di Kalimantan Barat dan memiliki agama Kristen Katolik. Adanya variasi berbeda itu bisa mengakomodasi pilihan-pilihan masyarakat. Penyebab yang memperkuat penulis mengambil lokasi di Pontianak ialah penulis dapat terjun langsung mengamati di wilayah tempat tinggal penulis sendiri, kerusuhan Sanggau Ledo antara Dayak dan Madura, kasus kerusuhan etnis pernah terjadi di Pontianak Timur pada tahun 2003 antarwarga pendatang dengan lokal, aksi penyerangan asrama Fransiskus, kerusuhan 25 Oktober 2000 antar etnis Melayu dan Madura, dan dilansir dari berita BBC News Indonesia pada tahun 2017 terdapat aksi bela ulama di Pontianak yang seperti terjadi politik SARA di Jakarta, dan yang terbaru di bulan September 2024 dilansir dari berita Pontianakinfo Disway mengatakan bahwa adanya perselisihan di Siantan Hilir yang berkembang menjadi isu antar etnis Melayu dan Madura. Dikatakan juga oleh Riama dalam jurnalnya mengatakan bahwa Kalimantan Barat telah mengalami konflik etnis berjumlah 19 kasus sejak tahun 1950-an (Al Hidayah et al., 2024).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi hal yang penting untuk dipaparkan karena bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Teori dan hasil temuan yang didapati dalam penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan dasar penelitian yang akan penulis laksanakan. Penelitian Andy menghasilkan bahwa pengguna politik identitas yang di gunakan para pelaku politik dan elite politik terlihat sengaja dalam menggunakannya untuk kepentingan politik sehingga berdampak realitas di pemilihan saat itu (Prima Sahalatu, 2018). Penelitian Rizky Reynaldy menemukan bahwa kedua paslon melakukan proses politisasi identitas. Tetapi politisasi identitas lebih aktif dilakukan oleh Eramas yang memberikan rangsangan mengenai isu putra daerah dan agama. Di sisi lain, Djoss mengarah kependekatan yang bersifat abstrak, ia tidak terlibat secara langsung, melainkan turut menghadiri tanpa menambahkan inisiatifnya (Renaldy, 2018). Penelitian Lukman mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pilkades di Desa Siru terjadi yang namanya politisasi etnis yang berdasarkan kenyataan bahwa masyarakatnya beragam sehingga orang-orang yang berkepentingan menjadikan potensi tersebut sebagai instrumen dalam merebut kekuasaan (Yunus, 2018). Peneliti Muhammad Nurul menemukan hasil penelitian yaitu politik identitas dibangkitkan sebab timbulnya cara pembangunan citra diri dan memunculkan harga diri. Berupa budaya, suku, agama dan etnis. Hal itu membuat seseorang menjadi satu diantara kelompok untuk menentukan pemimpin dari kategori yang sama (Firdaus & Andriyani, 2021). Peneliti Nur Lailatul Aidah mengatakan dalam hasil penelitiannya yaitu politik identitas masih sangat marak digunakannya dalam pemilu, hal ini sebagai strategi untuk mendapatkan suara dengan modal media sosial yang dapat diakses dengan gratis (Aidah et al., 2023)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tentunya dalam penelitian penulis kali ini mempunyai perbedaan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian oleh Andy dimana fokusnya terletak pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian oleh Rizky pada tahun 2018 juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Lukman Yunus yang melaksanakan penelitian pada 2018 juga berbeda dengan penelitian peneliti dimana Lukman mengambil fokus pada studi kasus pemilihan kepala desa di Manggarai Barat. Penelitian Muhammad Nurul juga berbeda dengan peneliti, dimana fokusnya secara luas yakni mengenai identitas agama dan etnis di Indonesia. Berbeda juga dengan peneliti Nur Lailatul dkk yang fokus politik identitas dalam pemilu serta melihat pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Dapat dikatakan perbedaan terletak pada objek dan hasil dari penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian penulis kali ini yakni calon dari Partai Solidaritas Indonesia di daerah pemilihan 4 (empat) . Hasil penelitian tentu mempunyai perbedaan karena adanya faktor perbedaan lokasi. Penulis sendiri mengambil lokasi penelitian di daerah asal penulis sendiri dan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berada di daerah penelitian tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan teori oleh Pierre L Van Den Bergh pada bukunya yang berjudul *The Ethnic Phenomenon* pada tahun 1987, sedangkan lima penelitian terdahulu yang penulis gunakan tidak menggunakan teori yang sama.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terbentuknya politik identitas pada pemilihan legislatif di daerah pemilihan 4 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Serta dapat mengetahui dan menganalisa dampak pemilihan legislatif di daerah pemilihan 4 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

II. METODE

Simangunsong mengatakan metode adalah simpulan kecil dari metodologi penelitian, dimana metodologi penelitian merupakan kumpulan-kumpulan dari banyaknya metode penelitian yang dapat dipakai dalam meneliti (Simangunsong, 2017). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sugiyono mengatakan bahwa penelitian pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan melandaskan berdasarkan filsafat *post positivisme*, yang akan meneliti dengan melihat hal yang alamiah, dalam penelitian itu instrumen kuncinya yakni penulis itu sendiri, *purposive* dan *snowball* akan digunakan dalam proses mengambil sampel. menganalisis data berupa induktif/kualitatif sehingga hasilnya menekankan arti dari generalisasi (Sugiyono, 2022). Tambah lagi menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang mempunyai hasil data deskriptif, hal ini berupa ucapan, tulisan dan tingkah laku orang yang diamati (Biklen, 2007). Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif karena metode ini memungkinkan penulis untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat secara mendalam. Analisis deskriptif juga dipilih penulis bertujuan untuk menggambarkan bagaimana politik identitas muncul secara rinci berdasarkan data lapangan. Adapun penulis menggunakan operasionalisasi untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono pengertian operasional sebagai petunjuk untuk menentukan bagaimana sebuah variabel akan diukur (Sugiyono, 2022). Operasional menurut Kerlinger merupakan hal yang berarti bagaimana penetapan kegiatan ataupun tindakan guna mengukur suatu konstruk atau variabel (Silalahi, 2012).

Pierre L Van Den Berghe dalam bukunya yang berjudul *The Ethnic Phenomenon* (1987) mengatakan bahwa politik identitas dibentuk dalam konteks hubungan kekuasaan yang meluar dari masyarakat yang majemuk, etnis, agama, perbedaan kelas, gender dan kelompok sosial lainnya. Ia juga mengatakan ada 3 (tiga) perspektif ketika mengamati/mengkaji politik identitas, di antaranya primordialisme pandangan yang berfokus pada pengamatan bahwa kelompok/organisasi sosial digambarkan dari agama, wilayah, bahasa, kebudayaan, serta organisasi merupakan hal yang diberi, tidak dapat dibantah dan dibawa sejak kecil. Konstruksionisme pendekatan yang dikembangkan lanjut oleh Fredrik Barth ini memandang bahwa budaya serta agama adalah hasil dari proses yang bertahap dan rumit, dimana identitas tersebut dibangun atas kekuatan mitologi kemudian berkembang dari pengalaman masa lalu yang berkelanjutan dan instrumentalisme, tahap selanjutnya dari konstruksionisme. Dimana pendekatan ini bertujuan sebagai alat untuk manipulasi dan mobilisasi sosial untuk menetapkan simbol-simbol agama yang akan menjadi alat kekuasaan. (Berghe, 1987). Alasan penulis menggunakan teori tersebut karena teori Pierre sangat relevan untuk menganalisis fenomena sosial-politik yang melibatkan konflik atau solidaritas berdasarkan identitas etnis, agama, ras, atau budaya. Van den Berghe menekankan pentingnya ikatan primordial (seperti etnisitas dan kekerabatan) dalam membentuk perilaku politik, pembangunan bagaimana identitas berkembang menjadi politik identitas serta bagaimana tahapan selanjutnya dari konstruksionisme melihat identitas menjadi alat manipulasi dan mobilisasi sebagai merebut kekuasaan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis mengambil informan secara *purposive* karena Informan dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena atau isu yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat dan mendalam. Sehingga penulis melakukan wawancara terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (1 orang), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kota Pontianak (1 orang), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kota Pontianak (1 orang), Tokoh Masyarakat Perwakilan Setiap Etnis (3 orang), dan Warga Daerah Pemilihan 4 (6 orang). Alasan penulis mengambil informan-informan tersebut karena orang tersebut ahli dalam permasalahan yang dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian penulis kali ini yang menjadi informan kunci ialah masyarakat yang menjadi

pemilih hal ini berguna untuk menggali persepsi mereka terhadap kampanye politik identitas dan pilihan politik mereka.

Penulis melaksanakan penelitian di Daerah Pemilihan 4 yang merupakan cakupan wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Alasan penulis mengambil lokasi dikarenakan penulis dapat terjun langsung mengamati di wilayah tempat tinggal penulis sendiri. Penelitian dilakukan mulai dari 6 Januari 2025 hingga 25 Januari yang berlangsung dengan jumlah 2 minggu hari kerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dengan melakukan teknik wawancara langsung kepada informan yang telah penulis tentukan dan dokumentasi juga dilakukan untuk menganalisis yang terjadi di lapangan.

3.1. Primordialisme, Kontruksionisme, Instrumentalisme dan Dampak

Kota Pontianak memiliki 6 kecamatan yang menempatnya dimana kecamatan-kecamatan tersebut memiliki dapil masing-masing kecuali dapil 5 yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. Kecamatan Pontianak Timur atau Daerah pemilihan 4 menjadi lokasi yang penulis ambil dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki luas sebanyak 12,061 km². Kecamatan Pontianak Timur sebagai kecamatan yang pernah mengalami 13 kali pergantian kepemimpinan sampai akhir tahun 2023 ini memiliki 86 rukun warga (RW) dan 415 rukun tetangga (RT) dalam pelaksanaan tata pemerintahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.

Partai politik membangun identitas kelompok yang berupa agama, suku, etnis, gender atau orientasi seksual biasanya sebagai dasar untuk memobilisasi pemilih sehingga memperoleh tujuan atau keunggulan elektoral dalam kompetisi politik. Untuk itu kesadaran akan perbedaan identitas juga perlu diperhatikan. Pemilihan legislatif pada Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Pontianak Timur dari Partai Solidaritas mengusung dua calon yang memiliki variasi berbeda bisa mengakomodasi pilihan masyarakat. Calon Noberta Tini merupakan masyarakat perempuan bersuku Dayak yang beragamakan Kristen sedangkan saingannya Ujas merupakan pendatang bersuku Jawa beragamakan Islam.

Saat terjun ke lapangan, penulis mengawali penelitian ini dengan menekankan kesadaran atau pemaknaan identitas dari sebuah kelompok. Sebagaimana penulis melakukan wawancara kepada salah satu tokoh etnis Melayu. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemaknaan identitas kelompok harus memiliki pemahaman yang luas, agar tidak hanya mementingkan satu sisi saja, identitas kelompok juga ada baiknya dalam hal membangun solidaritas dan kebersamaan akan tetapi bisa mengarah ke hal yang dapat memicu persaingan. mengenai bagaimana para calon sendiri berperilaku dalam beraktivitas politik dijawab oleh masyarakat setempat. Berdasarkan jawaban dari wawancara, seorang calon politik paling utama maju berlandaskan kepentingan publik yang besar. Pelaku politik harus menekankan pentingnya mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ia juga sudah sepatutnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, daripada terfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tak lupa juga kedua calon yang penulis teliti juga menunjukkan sikap profesional. Hal ini dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat agar dapat menjaga kondusivitas dan menghindari konflik yang menyinggung SARA.

Dalam kepemimpinan juga memiliki berbagai karakter dan teknik dalam pengaplikasiannya, yang dimana dapat mengubah seseorang dalam menentukan sebuah keputusan. Hubungan emosional sangat penting karena menyediakan ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan dan membangun

ikatan yang mendalam perasaan emosional yang dibawa merasa pilihannya memang dipengaruhi dari identitas kelompok. Nyatanya lebih mementingkan melihat dari kondisi yang relevan dengan kondisi kelompoknya. Dikatakan tidak adanya perasaan emosional pribadi antara warga dengan para calon. Dimana dewasa ini, masyarakat sudah berpikiran secara luas dan terbuka. Potensi politik identitas sesuai dengan tema skripsi penulis merujuk pada dimensi konteks sosial politik dan dimensi kontestasi. Sebagaimana data di dalam IKP 2023, menyatakan bahwa Pontianak termasuk dalam kategori sedang di kategori kontestasi. Dimensi kontestasi ini mengenai latar belakang etnis, suku, dan agama, kampanye bermuatan SARA, dan adanya konflik antar pendukung. Pada pemilihan legislatif 2024 kemarin di Kecamatan Pontianak Timur, penyampaian visi dan misi dari kedua calon memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi salah satu perhatian masyarakat untuk menetapkan pilihannya. Poin penting lainnya juga ialah relasi antara calon dengan masyarakat yang akan memilihnya. Isu-isu yang mengarahkan pada penggunaan identitas sebagai keunggulan mereka juga menjadi dinamika yang tidak dihindarkan.

Terbentuknya politik identitas dalam fenomena yang terjadi di masyarakat memang tidak dapat dihindarkan terlebih lagi hal itu tidak asing bagi Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut memang ada dalam kehidupan masyarakat dan semakin marak menjelang pemilihan akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang besar ataupun konflik. Adanya pengkategorian mengenai ras, etnis dan agama yang dimuat dalam data di bagian pembahasan demografi tempat penelitian penulis menjadi hal yang tampak secara nyata mendukung adanya politik identitas. Pada tabel tentang suku etnis yang berada di Kalimantan Barat, ditampilkan suku Dayak yang menjadi suku dominan posisi pertama memberikan efek yang sesuai dengan hasil dari pemungutan suara Ibu Noberta bersuku Dayak dan Pak Ujas bersuku Jawa. Hal ini dikatakan bahwa para pemilih yang bersuku sama, cenderung memilih perwakilan yang berdasarkan etnis yang sama dengan mereka.

Perilaku pemilih yang dimaksud pada penelitian kali ini ialah bagaimana perilaku para pemilih yang berasal dari identitas yang sama seperti kedua calon dalam menggunakan hak pilih mereka. Dimana perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan hak pilih, karena hak pilih memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan arah kebijakan dan pemimpin yang mereka inginkan. Perilaku pemilih mencerminkan bagaimana seseorang memanfaatkan hak pilih tersebut, baik itu melalui keputusan untuk memilih atau tidak memilih, serta bagaimana mereka memilih calon atau partai berdasarkan informasi, keyakinan, atau kepentingan tertentu. Selain itu, hak pilih bukan hanya soal memiliki hak untuk memilih, tetapi juga bagaimana perilaku pemilih tersebut mencerminkan partisipasi aktif dalam sistem demokrasi. Dihubungkan dengan identitas, nyatanya identitas memiliki peran yang dapat mempengaruhi juga dalam pemilihan. Pemilih cenderung memilih calon yang memiliki identitas yang sama. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persaingan atau memicu terjadinya konflik.

Masa kampanye menjadi masa-masa yang penting karena menjadi wadah pengenalan kandidat, pemaparan visi dan misi, mencari dukungan dan membuat jaringan yang dapat terhubung, membangun kepercayaan dari masyarakat untuk dirinya serta memobilisasi para pemilih dalam menentukan hak pilihnya. Penulis pun bertanya terkait aktivitas calon dalam masa kampanye yang berkaitan dengan politik identitas seperti apakah ada saling mengungguli dan menunjukkan eksistensi. kedua calon tidak menggunakan identitas mereka dalam menarik dukungan atau perhatian masyarakat. Mereka mengedepankan tujuan mereka mewakili para rakyatnya dengan membangun citra yang baik serta memaparkan visi misi yang mereka bawakan guna selaras dengan keinginan masyarakat dan membangun daerah tersebut. Hal ini memang sewajarnya para calon politik bersikap seperti ini, dapat dikatakan netral dalam masa kampanye tanpa adanya penggunaan identitas yang mereka miliki. Perlu ditekankan juga bahwa politik yang sehat adalah politik yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Para calon pemimpin harus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat secara adil dan bijaksana, tanpa terjebak dalam politik identitas yang dapat merusak

persatuan. Terjadinya praktik politik identitas tentunya menyebabkan dampak yang berbeda-beda yang terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, referensi yang dijadikan antara beberapa daerah bisa menjadi upaya saling menguatkan integritas antar suatu kelompok dengan jangka waktu yang berdekatan. Bentuk lainnya politik identitas yang menjurus ke arah konflik kepentingan yaitu politisasi SARA yang menimbulkan kerusuhan di lingkungan masyarakat karena adanya singgungan antar etnis maupun agama.

Dampak yang dihasilkan dari politik identitas ialah dapat memperkuat solidaritas kelompok karena adanya pengakuan identitas yang sama yang mungkin selama ini tidak terakomodasi. Selanjutnya politik identitas ini dapat memberikan keleluasaan terhadap kelompok untuk mengekspresikan hak-hak demokrasi dan berpolitikanya. Namun disisi lain politik identitas juga dapat menimbulkan polarisasi sosial dalam artian politik identitas bisa memicu fragmentasi kelompok yang beresiko menimbulkan ketegangan antar kelompok.

Adapun data di lapangan yang diberikan oleh KPU Pontianak kepada penulis terkait data yang mendukung adanya peningkatan partisipasi politik dibanding tahun sebelumnya. Jika di pemilihan legislatif 2024 terdapat 72.402 pemilih aktif dan suara sah sebanyak 62.191 sedangkan di pemilihan legislatif 2019 ada 72.208 pemilih aktif dan suara sah sebanyak 56.081. Berdasarkan data yang diberikan oleh KPU, terjadi peningkatan jumlah data pemilih sebanyak 194 kepala dan 6.110 surat suara sah dibanding 2019. Hal ini menandakan bahwa pemilihan di 2024 terjadi peningkatan partisipasi politik.

Kampanye yang dilakukan oleh para calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dimana pada pasal 72 para calon tidak boleh mengina seseorang terkait agama, suku, ras, golongan dan calon lain. Para calon dilapangan juga sesuai dengan peraturan yaitu tidak adanya penghasutan ataupun adu domba calon dengan masyarakat yang dapat memperburuk hubungan. Untuk tindakan yang lebih nyatanya, para calon tidak menggunakan tanda atau atribut yang dapat memperlihatkan identitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adanya larangan yang dibuat oleh KPU telah dilaksanakan oleh para calon.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil temuan utama penelitian penulis kali ini ialah bahwa politik identitas yang terjadi di daerah pemilihan 4 Kecamatan Pontianak Timur terjadi oleh para pemilihnya sendiri yang cenderung memilih calon sebagai perwakilan mereka dengan mendukung kesamaan identitas atau asal yang sama. Hal ini berdasarkan kejadian di lapangan dari jawaban wawancara. Data dari BPS juga menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki dominan etnis Dayak, sehingga para pemilih tersebut mengusung calon dari asal yang sama.

Penelitian penulis kali ini mendukung adanya hasil penelitian dari Lukman yang mengatakan bahwa ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakatnya majemuk sehingga kemudian oleh orang-orang yang berkepentingan menjadikan potensi tersebut sebagai instrumen dalam merebut kekuasaan (Yunus, 2018). Seperti yang ditemui penulis bahwa dari masyarakatnya yang menganggap bahwa perbedaan yang dimilikinya membuat sikap mereka menjurus terhadap kesamaan dari asal mereka sehi ngga memilih dari identitas yang sama. Sama halnya dengan jurnal oleh Nur Lailatul yang mengatakan bahwa dimana kemunculan politik identitas ini disebabkan adanya perbedaan agama, suku, adat an lainnya yang dimana salah satu kelompok-kelompok tertentu merasa di intimidasi dan didiskriminasi oleh para pihak-pihak yang lain (Aidah et al., 2023). Temuan penelitian penulis juga memperkuat dengan temuan hasil penelitian dari Muhammad Firdaus . Idetntitas dapat dikendalikan atau dipolitisasi oleh orang- orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan

dari kelompok- kelompok atau individu-individu yang merasa sama, baik secara agama, RAS, budaya, etnis atau kesamaan lainnya (Firdaus & Andriyani, 2021).

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait oleh beberapa peneliti terdahulu terkait politik identitas :

- a. Pengguna politik identitas yang di gunakan para pelaku politik dan elite politik terlihat sengaja dalam menggunakannya, bahwa peran politik identitas di desa Siru acap kali dijadikan jargon oleh masing-masing kontestan sebagai basis mencapai kekuasaan atau jabatan kepala desa. Strategi ini dinilai sukses dengan melihat kondisi masyarakat desa Siru yang multi etnis kemudian dimanfaatkan sebagai basis dalam menjanging massa. Strategi yang metodologis dan sistemik akhirnya kecenderungan masyarakat dalam memilih kepala desa adalah didasarkan pada kesamaan etnis dengan masing-masing calon kepala desa. Adapun dampak dari politik identitas etnik ini adalah terjadinya konflik yang tergolong ke dalam konflik kepentingan. Hasil konstruksi identitas dalam kontestasi pilkades memunculkan suatu situasi yaitu individu-individu mengidentifikasi dirinya dengan sesama etnis sehingga lahir suatu sikap etnosentrisme dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Konflik tersebut tergolong konflik ringan dan tidak bertahan lama (Yunus, 2018);
- b. dalam memenangkan Pilgub Sumut 2018. Hal tersebut merupakan adopsi dari dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan Djoss merupakan hal yang biasa sebagai pelengkap dari visi-misi mereka untuk membangun Sumut. Diharapkan kepada masing-masing pasangan calon agar lebih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi-misi dan program unggulan yang akan dilakukan dalam membangun daerah selama satu periode ke depan dan kepada peneliti berikutnya, diharapkan mewawancarai Terjadi yang namanya politisasi etnis yang berdasarkan kenyataan bahwa masyarakatnya beragam sehingga orang-orang yang berkepentingan menjadikan potensi tersebut sebagai instrumen dalam merebut kekuasaan. Paslon. Namun demikian, politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss tidak seaktif dengan apa yang dilakukan oleh Eramas. Eramas gencar memberikan stimulus kepada masyarakat terkait isu putra daerah dan isu agama, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss lebih kepada pendekatan yang bersifat abstrak, tidak ada keterlibatan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan, melainkan hanya turut menghadiri saja tanpa memprakarsainya. Proses politisasi identitas yang dilakukan Eramas dapat dikatakan sebagai strategi mereka (Renaldy, 2018)
- c. Bahwa kebangkitan politik identitas di Indonesia terjadi karena adanya upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri antar suku, budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan seseorang sebagai bagian dari salah satu golongan untuk memilih mereka yang seagama, sesuku, sebudaya, dan se etnis untuk masuk pemerintahan (Firdaus & Andriyani, 2021).
- d. Politik indentitas merupakan identitas politik yang dipegang oleh sebagian warga negara bersamaan dengan arah politiknya, biasanya politik identitas tercipta karena adanya kelompok sosial yang merasa diintimidasi, didiskriminasi, oleh dominasi negara dan pemerintah. Dan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang sedang berjalan, sehingga hal tersebut yang membuat lahirnya politik identitas dalam bernegara sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya politik identitas merupakan sebuah cara berpolitik yang tercermin pada kesamaan identitas, politik identitas ini tentunya menimbulkan dampak terhadap bangsa dan negara kita, biasanya politik

identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan juga pertentangan menuju proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia sendiri dalam hal ini sangat marak digunakannya politik identitas ketika akan diadakannya pemilu, politik identitas jarang tidak digunakan oleh oknum politik karena merupakan strategi untuk mendapatkan suara atau menarik simpati masyarakat hanya dengan modal media sosial yang dapat diakses dengan gratis. Salah satu usaha penanggulangan politik identitas dalam Pemilu 2024 adalah dengan memperkuat kelembagaan partai politik (Aidah et al., 2023).

- e. Bahwa para elite politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Hal ini berdampak pada realitas politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi tawar, ini menunjukkan faktor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 (Prima Sahalatu, 2018).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

- a. Penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif kemarin, bahwa kedua calon tidak menggunakan perbedaan identitas yang dimiliki oleh mereka. Akan tetapi politik identitas itu terbentuk dari masyarakat yang memiliki kesamaan identitas dengan kedua calon. Sehingga mereka lebih memilih dalam pencoblosan untuk memajukan orang-orang yang berasal dari yang sama.
- b. Politik identitas dapat memperkuat solidaritas kelompok karena adanya pengakuan identitas yang sama yang mungkin selama ini tidak terakomodasi. Selanjutnya politik identitas ini dapat memberikan keleluasaan terhadap kelompok untuk mengekspresikan hak-hak demokrasi dan berpolitiknya. Namun disisi lain politik identitas juga dapat menimbulkan polarisasi sosial dalam artian politik identitas bisa memicu fragmentasi kelompok yang beresiko menimbulkan ketegangan antar kelompok.
- c. Pemilihan di 2024 terjadi peningkatan partisipasi politik.
- d. Kedua calon tidak melanggar aturan yang dibuat oleh KPU

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa politik identitas pada dasarnya terbentuk karena berdasarkan identitas dan adanya perbedaan. Identitas dan perbedaan itu umumnya berupa ras, suku, etnis dan agama. Fenomena sosial dan politik ini sering hadir di masyarakat, ketika masyarakat tersebut merasakan adanya dasar identitas politik mereka pada karakteristik tertentu seperti etnis, agama, suku, ras, gender atau orientasi seksual. Tidak jarang juga, fenomena ini berkembang karena adanya marginalisasi, ketidakadilan atau ketidakseimbangan kekuasaan yang di alami oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka yang minoritas atau merasa terdiskriminasi seringkali membentuk aliansi politik identitas untuk memperjuangkan hak-hak mereka guna mendapat keadilan serta kesetaraan. Politik identitas juga bisa muncul dari kebutuhan individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan pengakuan dalam skala besar dengan adanya identitas mereka. Saat terjadinya penyelenggaraan pemilihan calon pada pemilihan legislatif di daerah pemilihan 4 Kecamatan Pontianak Timur tidak terdapat isu-isu yang membuktikan bahwa calon menggunakan perbedaan sebagai hal yang mengarah ke politik identitas. Hal ini membuktikan politik identitas tidak terbentuk dalam pemilihan kemarin.

Hasil wawancara juga mengatakan bahwa memang politik identitas merupakan hal yang tidak asing terjadi di Kota Pontianak. Terjadinya praktik politik ini tidak dalam skala besar yang bisa menyebabkan konflik atau perpecahan. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Politik identitas di Kecamatan Pontianak Timur agar menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Pontianak Timur yaitu Bapak Muhammad Akif beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, para informan dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, N. L., Rochmadian, S., Maliha, U., Sunan, U., Surabaya, A., & Abstrak, K. K. (2023). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Mei*, 3(1), 1–20.
<https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/411/224>
- Al Hidayah, R., Maftuh, B., & Malihah, E. (2024). Relasi Sosial Antar Etnis (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Pontianak). *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1.
<https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/viewFile/1385/1000>
- Berghe, P. L. Van Den. (1987). *The Ethnic Phenomenon*. Greenwood Press.
<https://lesacreduprintemps19.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/the-ethnic-phenomenon-1987-by-pierre-l-van-den-berghe.pdf>
- Biklen, B. dan. (2007). *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. https://math.buffalostate.edu/dwilson/med595/qualitative_intro.pdf
- Brie, M., & Solcan, A. (2025). *Identity and societal security in the republic of moldova*. C. 57–75.
<https://real.mtak.hu/210309/1/17543-Article-Text-71326-1-10-20241105.pdf>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. https://sudimarataban.desa.id/desa/upload/media/upload_buku_9092022/Dasar-Dasar Ilmu Politik.pdf
- Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (E. Herdiawan (ed.)). CV Cendekia Press. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1273/2/Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya_2.pdf
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Pembangkaian Sosok Basuki Tjahaja Purnama Dari Sudut Pandang Politik Identitas Pada Pilkada Dki Jakarta 2017 Dalam Eramuslim.Com Dan Tirto.Id Abstrak*.
https://repository.unair.ac.id/80897/3/JURNAL_Fis.K.16_19_Ang_p.pdf
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 47.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/12927/7056>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Henderson, A. (2025). Political Polarization and Christian Nationalism in Our Pews. *Religions*, 16(4).
<https://doi.org/10.3390/rel16040507>
- Kim, S., Lee, H., & Konlan, K. D. (2025). The recent trends in discrimination and health among ethnic minority adolescents: an integrative review. *BMC Public Health*, 25(1).
<https://doi.org/10.1186/s12889-025-21729-0>
- Labolo, M. (2023). *Politik identitas dalam pemilu: belajar dari Banda Aceh*. Pendidikan Deepublish.
https://books.google.co.id/books/about/Politik_identitas_dalam_pemilu.html?id=Hx-x0AEACAAJ&redir_esc=y
- Manuel, C. (2010). *The Rise of the Network Society*. Black Well Publisher.
<https://doi.org/10.1002/9781444319514>
- Merriam, W. (2020). *Identity*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/identity>
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47.
<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Perdana, A. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan*, 11(2), 225–238.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>

- Prima Sahalata, A. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 240–254. [https://eprints.untirta.ac.id/969/1/POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta P - Copy.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/969/1/POLITIK_IDENTITAS_DALAM_PEMILIHAN KEPALA DAERAH Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta P - Copy.pdf)
- Renaldy, R. (2018). *Politisasi Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27000/23754>
- Rusfiana, Y. dan I. N. (2020). Dinamika Politik Kontemporer International dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya. In *Dinamika Politik Kontemporer International dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya* (pp. 1174–179135). <http://eprints.ipdn.ac.id/2475/1/BUKU - DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER.pdf>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1728/Ulber_142409-p.pdf
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. https://www.researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C
- Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., Qodir, Z., & Misran, M. (2022). Political Identity: A systematic review and bibliometric analysis. *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315565>
- Widiyanti, T. (2009). *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. Research Center for Politics and Government. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/en/politik-subaltern-pergulatan-identitas-waria-2/>
- Yunus, L. (2018). Peran Politik Identitas Etnis (Studi Kasus Pilkades Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat). *Skripsi*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4683-Full_Text.pdf

